

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara negara Indonesia ialah negara yang luas dan salah satu negara yang terdiri dari banyak pulau, beragam budaya serta memiliki banyak penduduk. Hal ini mengakibatkan semakin banyak penduduk maka semakin bermacam-macam pula mata pencaharian penduduknya, dari berbagai macam mata pencaharian tersebut maka berdampak pada perekonomian masyarakat itu sendiri. Salah satunya mereka memanfaatkan sumber daya di daerah mereka untuk berbisnis dan mendapatkan penghasilan untuk mempertahankan kehidupan ekonomi mereka sendiri. Maka dari itu salah satu tindakan yang diambil oleh pemerintah ialah membuat kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu mengatur perekonomian daerah tersebut

Indonesia saat ini memiliki 17.000 pulau, dan 5 provinsi dengan jumlah pulau terbanyak yaitu papua barat dengan jumlah pulau 4.520 pulau, lalu kepulauan riau dengan 2.028 pulau, lalu ada sulawesi tengah dengan 1.572 pulau, selanjutnya ada maluku dengan 1.388 pulau dan maluku utara dengan 901 pulau (Badan Pusat Statistik,2023). Kemudian bisa diketahui bersama secara tidak langsung untuk melaksanakan kegiatan ekonomi maupun transportasi. Maka butuh pelabuhan di setiap pulau untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi maupun kegiatan apapun yang berkaitan dengan akses penyebrangan antar pulau.

Fungsi lain dari pelabuhan adalah sebagai tempat pertemuan dua jenis angkutan atau lebih serta interface berbagai kepentingan yang saling terkait. Barang yang diangkut menggunakan kapal akan dibongkar dan di pindahkan ke jenis kendaraan lain yaitu kendaraan darat. Sebaliknya barang yang diangkut dari kendaraan darat di pindahkan ke pelabuhan bongkar dan akan dimuat ke kapal. Oleh sebab itu berbagai kepentingan saling bertemu di pelabuhan seperti perbankan, perusahaan pelayaran, bea cukai, imigrasi, karantina, syahbandar dan pusat kegiatan lainnya. Atas dasar inilah dapat dikatakan bahwa pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur transportasi, dan membangkitkan kegiatan perekonomian suatu wilayah tersebut karena bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik.

Dari banyaknya pulau tersebut maka muncullah yang namanya pelabuhan tidak resmi atau bisa juga disebut dengan informal ports. Berbica pelabuhan tidak resmi yang dapat diartikan sebagai tempat muat atau pembongkaran barang yang tidak diatur atau disahkan oleh otoritas maritim atau pemerintah. Penggunaan pelabuhan seperti itu dapat melibatkan berbagai resiko dan melanggar regulasi keamanan. Pelabuhan tidak resmi seringkali terbentuk karena beberapa alasan. Salah satunya karena kebutuhan ekonomi lokal yang tidak terpenuhi, sehingga masyarakat setempat menciptakan pelabuhan sendiri untuk mendukung kegiatan perdagangan. Faktor lain bisa termasuk kurangnya infrastruktur resmi, birokrasi yang rumit, atau kondisi geografis yang sulit diakses oleh pelabuhan resmi.

Pelabuhan tidak resmi juga muncul sebagai hasil dari perdagangan ilegal atau aktivitas ilegal lainnya yang mencari tempat yang kurang dalam segi pengawasannya. Terkadang, pelabuhan tidak resmi itu dapat berkembang karena adanya kebutuhan mendesak atau karena ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan fasilitas resmi yang memadai. Kemudian pelabuhan tidak resmi mencakup sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi baik masyarakat lokal maupun ekonomi regional. Beberapa kejadian umum yang terkait dengan pelabuhan tidak resmi melibatkan aktivitas ekonomi lokal yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang pekerjaan dan peluang perdagangan bagi masyarakat setempat.

Pengelola pelabuhan, merupakan persoalan yang sangat rumit dan membutuhkan pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang “kaya” dan sistematis. Secara umum, masalah pelabuhan ini hanya di atur dalam aturan pelayaran, yaitu Undang-undang tentang pelayaran No.21 Tahun 1992. Sedangkan yang khususnya mengenai pengelolaan pelabuhan baru diatur oleh peraturan singkat Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2001.¹

Pelabuhan tidak resmi di Indonesia ialah fasilitas yang dibangun atau digunakan secara tidak resmi oleh masyarakat atau kelompok tertentu untuk kegiatan pemuatan dan penurunan barang tanpa izin resmi dan otoritas pelabuhan atau pemerintah. Pelabuhan tidak resmi seringkali berkembang dilokasi yang

¹ Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001

strategis dan dapat menjadi tempat untuk kegiatan ilegal seperti penyelundupan maupun perdagangan barang ilegal. Pelabuhan tidak resmi di Indonesia umumnya tidak memiliki standarisasi keselamatan bagi pengguna pelabuhan tersebut, serta pelabuhan tidak resmi bisa juga menjadi sumber konflik antara pihak terlibat. Pelabuhan tidak resmi di Indonesia dapat ditemukan diberbagai lokasi diseluruh Kepulauan. Beberapa daerah yang sering dilaporkan memiliki pelabuhan tidak resmi termasuk daerah pesisir Jawa, kepulauan di sekitar pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan di sekitar Nusa Tenggara, dan Kepulauan di Bali.

Daerah salah satu di Kepulauan Riau yang terdapat pelabuhan tidak resmi didalamnya. Di Kepulauan Riau pelabuhan tidak resmi dapat ditemukan diberbagai pulau-pulau kecil dan daerah pesisir yang terpencil. Beberapa pulau yang sering dilaporkan memiliki pelabuhan tidak resmi termasuk pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Natuna. Dari setiap kabupaten atau kota di Kepulauan Riau hampir semua daerah memiliki pelabuhan tidak resmi. Ini bisa makin banyaknya pelabuhan tidak resmi di Kepulauan Riau di karenakan potensi laut yang ada diwilayah Kepulauan Riau memiliki prospek yang bagus dalam hasil laut yang melimpah. Namun karena sifat pelabuhan ini tidak resmi, informasi tentang lokasi dan praktik apa saja yang terjadi didalamnya bisa ditutupi dan bisa berubah dan sulit dipastikan dengan tepat.

Pelabuhan tidak resmi di Pulau Bintan salah satunya ada di daerah Kecamatan Bintan Timur. Kecamatan Bintan Timur merupakan salah satu wilayah yang

dijadikan tujuan oleh masyarakat yang tinggal dipulau pulau sebagai akses rantai makanan maupun roda perekonomian. Di Kecamatan Bintan Timur terdapat dua kelurahan yang memiliki akses yang dapat terhubung langsung dengan pulau pulau kecil tersebut yaitu kelurahan kijang kota dan kelurahan sei nam. Dari letak geografis Kecamatan Bintan Timur memiliki peluang besar terhadap munculnya pelabuhan tidak resmi. Ada beberapa lokasi yang memiliki pelabuhan dari segi standar maupun izin tidak memenuhi standar. Pelabuhan resmi memiliki beberapa kriteria, termasuk infrastruktur yang memadai, keamanan, fasilitas penanganan kargo, pelayanan pelanggan, dan kepatuhan terhadap pelanggan dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah terkait kegiatan pelabuhan. Selain itu, kriteria pelabuhan resmi juga bisa mencakup kedalaman perairan, aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan.

Di Kecamatan Bintan Timur memiliki beberapa titik adanya pelabuhan tidak resmi. Ini dikarenakan pihak pengusaha atau bisa dibilang toke atau bos pemilik usaha penangkapan ikan di Kecamatan Bintan Timur memiliki akses mudah untuk membuat atau mendirikan pelabuhan sendiri dikarenakan mereka memiliki rumah diatas laut yang secara langsung memiliki akses langsung ke laut. Dari praktik inilah yang dapat membuat dampak bagi masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang kelautan, dampak bagi perekonomian bagi nelayan disekitar Kecamatan Bintan Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang serta untuk mempermudah perincian, maka rumusan permasalahan yang ingin di bahas adalah ” Bagaimana peran pelabuhan informal pada perekonomian nelayan di Kecamatan Bintan Timur?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa pengaruh pelabuhan informal terhadap kepentingan ekonomi nelayan di Kecamatan Bintan Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan memiliki manfaat atau kegunaan, baik bagi peneliti maupun pihak manapun yang memerlukannya dan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan keamanan laut. Serta penelitian ini juga bermanfaat sebagai wadah bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan selama duduk dibangku perkuliahan.

2. praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperoleh identifikasi yang jelas berupa data-data tentang upaya bagi pemerintah maupun

pihak kepolisian untuk mencegah bertambahnya pelabuhan tidak resmi di Kecamatan Bintang Timur.

